

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, 1989.

Andi Pangerang Moenta,dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Azmi Fendri, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Buchari Alma, *Manajemen Daya Sumber Manusia*, Alfabeta, Bandung, 2011.

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, DiTinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ledia Hanifa Amaliah *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta Selatan, 2016.

Mucsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Muhammad Sadi, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Admnistrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020,

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990.

Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Refika Aditama, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

C. Jurnal dan Skripsi

Arif Mahtufin, 2016, “MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol. 3, No. 2.

Dheni Yerria, dkk, 2020, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) dalam penegakan peraturan daerah kabupaten Mamasa, *Journal Peqquruang: Conference Series*, Vol 1 No.2.

Fahrul Gafar, dkk, 2022, Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No. 3.

Fajri Hidayatullah, Khaerul Umam Noer, 2021, Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di Bumd DKI Jakarta, *Delegalata Jurnal Hukum*, Vol 6 No 2.

Istifarroh, Widhi Cahyo Nugroho, 2019, Perlindungan hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara, *Mimbar Keadilan*, Vol 12 No 1, hlm 24.

Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, Alfian Ramdoni, 2022, “Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja”, *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Volume 3 Nomor 1.

Ridwan Efendi Siregar, 2019, Perlindungan Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di Kota Padang. *Skripsi*. Program Sarjana Hukum Universitas Andalas. Padang.

Salmon Bihuku, 2018, Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1.

Sarah Dewi Adlina, Mahendra Wardhana, 2023, Ius Constituendum Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan yang Tidak Mempekerjakan Penyandang

Disabilitas, *Novum: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, Vol 10 No.4.

Sapyo Wahyono, 2019, Prespektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Madura*, Vol. 20 No 2.

Yenny Krisnny Tannasa, 2016, Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Menangani masalah Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Lex Administratum*, Vol. IV/No.

D. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/10/sebanyak-2837-pekerja-disabilitas-berusahasendiri-pada-2020> (Diakses pada 01/5/2024 Pukul 19.52)

<https://pdampadang.co.id/index.php> (Diakses pada 30/07/2025 Pukul 08:13)

<https://padang.go.id/dinas-tenaga-kerja-dan-perindustrian> (diakses 17/02/2025)

<https://www.banknagari.co.id/profile?page=%2B%2FVeYox7zKP1Ccg7uxzF%2BQ%3D%3D> (diakses pada 19/02/2025 Pukul 11.05)

https://www.halodoc.com/artikel/5-jenis-pekerjaan-yang-bisa-dilakukan-penyandangdisabilitas?srsId=AfmBOooNR_2vk1JWNgjp7NFg4zVLSq_sRgJFXsJ84MitssT3eMo3xO695(diakses pada 15/05/2025 Pukul 14.00)

